
Mengukur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari Dimensi Wajib Pajak Orang Pribadi

Bayu Astha Wiguna^{1*}, Ni Luh Yulyana Dewi^{2*}
Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia
asthawiguna7@gmail.com yulyanadewi@undiknas.ac.id

Diserahkan: 01-11-2024

Diterima: 17-11-2024

Diterbitkan: 30-11-2024

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, *financial technology*, dan literasi keuangan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, *financial technology*, dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran pajak, pemanfaatan teknologi finansial, serta literasi keuangan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan program edukasi pajak, integrasi teknologi digital dalam sistem perpajakan, dan kolaborasi antara otoritas pajak dengan penyedia layanan keuangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPN secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Financial Technology, Literasi Keuangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerimaan Pajak, Kepatuhan Pajak.

Abstract:

This study aims to analyze the impact of taxpayer awareness, financial technology, and financial literacy on Value Added Tax (VAT) revenue at KPP Pratama Gianyar. The research method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distributed to 100 individual taxpayer respondents selected using purposive sampling. The results indicate that the variables of taxpayer awareness, financial technology, and financial literacy have a significant positive impact on VAT revenue. These findings emphasize the importance of increasing tax awareness, utilizing financial technology, and enhancing financial literacy to support the optimization of tax revenue. The study recommends the development of tax education programs, integration of digital technology in the tax system, and collaboration between tax authorities and financial service providers to improve taxpayer compliance and ensure sustainable VAT revenue.

Keywords: Taxpayer Awareness, Financial Technology, Financial Literacy, Value Added Tax (VAT), Tax Revenue, Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional adalah dua sumber pajak negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah beberapa pajak dalam negeri. PPN merupakan

sumber pajak terbesar kedua setelah PPh, memberikan sekitar 30% dari penerimaan pajak (Silalahi & Ginting, 2020). PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean. Pajak yang dikenakan atas setiap nilai yang dapat diidentifikasi dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Renata & Kaniskha, 2016)

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi penerimaan (Susanto & Khoiriawati, 2022). Kesiadaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Nurlaila, 2023). Berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi keuangan, dan literasi keuangan.

Beberapa peristiwa yang terjadi di bidang pajak Indonesia belakangan ini termasuk penyalahgunaan dana pajak yang dibayarkan wajib pajak oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, yang membuat wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Tidak diragukan lagi, situasi ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin terjadi kesalahan pembayaran pajak yang dapat merugikan mereka sendiri. Akibatnya, sejumlah masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai ketaatan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan dalam lingkungan perpajakan yang menuntut partisipasi aktif pajak dalam penyelenggaraan perpajakan (Widiasti et al., 2023).

Financial Technology (Fintech) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan keuangan yang inovatif, efisien, dan inklusif. Fintech dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, seperti pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran PPN secara online, serta pengelolaan data dan informasi perpajakan. Fintech juga dapat membantu otoritas pajak untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam pengawasan dan pemeriksaan perpajakan (Herawati et al., 2020).

Fenomena literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, indeks literasi keuangan Indonesia hanya mencapai 38,03%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan mereka. Dampaknya terhadap PPN adalah bahwa rendahnya literasi keuangan dapat menurunkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat.

Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan pajak negara pada Februari 2022 mencapai Rp 199,44 triliun, naik 36,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 146,1 triliun. Meskipun ada beberapa variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak seorang pebisnis, faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat literasi keuangan pebisnis tentang pengenaan pajak dari kegiatan usahanya. Faktor kedua adalah penggunaan teknologi keuangan sebagai sistem yang memungkinkan pebisnis melakukan transaksi dengan lebih mudah, baik dalam hal bisnis maupun transaksi pribadi (Pirri et al., 2023).

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar.

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar (Orang)	Wajib Pajak Lapor (Orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	6,916	3,342	48.32%



2019	7,516	3,625	48.23%
2020	8,343	3,932	47.13%
2021	9,386	4,141	44.12%
2022	10,414	4,407	42.32%

Sumber: KPP Pratama Gianyar (2022)

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak justru menurun. Pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 48.32%, tetapi kemudian turun lagi menjadi 48.23% pada tahun 2018, kemudian turun lagi menjadi 44.13% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 44.12%, dan pada tahun 2021, penurunan tersebut mencapai 42.32%. Untuk mencapai tujuan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak adalah komponen penting (Ardianti et al., 2023).

Data Penerimaan PPN KPP Pratama Gianyar

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah	153.743.629.233	225.344.415.319	241.164.442.800	312.880.218.343

Sumber: KPP Pratama Gianyar (2023)

Meskipun kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Gianyar mengalami naik turun di tahun 2018-2022, jumlah penerimaan pajaknya pada tahun 2020-2023 mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa penerimaan PPN tahun 2023 mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pendapatan yang diterima oleh negara dari pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah karena sifatnya yang luas dan berlaku di berbagai sektor ekonomi (Ischabita et al., 2022).

Penelitian mengenai PPN sudah banyak dilakukan (Sinambela & Rahmawati, 2019) melakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang berpengaruh terhadap PPN dan diperoleh kesimpulan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Pengujian secara simultan inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. (Mispa, 2019) juga melakukan penelitian terkait faktor – faktor yang mempengaruhi PPN dan diperoleh kesimpulan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPN.

Penelitian sebelumnya menggunakan beberapa variabel bebas seperti inflasi, nilai tukar rupiah, pemeriksaan pajak, dan *self assessment* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertambahan PPN. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi PPN dengan variabel bebas yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Financial Technology, dan Literasi Keuangan.

KAJIAN TEORI

Teori Kepentingan

Teori Kepentingan (*Belangen Theory*) mempertimbangkan bahwa pembagian beban pajak, termasuk dalam konteks pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya didasarkan pada kepentingan individu. Ini mengindikasikan bahwa individu membayar pajak berdasarkan sejauh mana pelayanan atau manfaat yang mereka terima dari pemerintah (Pratama, 2021).

Dalam konteks variabel kesadaran wajib pajak, individu yang lebih sadar akan kewajiban pajak mungkin lebih cenderung berpartisipasi dalam pemungutan pajak karena mereka memahami manfaat yang dapat diperoleh dari pembayaran pajak, termasuk pembiayaan layanan publik dan infrastruktur. Fintech, dengan kemampuannya untuk meningkatkan keterjangkauan dan efisiensi layanan keuangan, juga dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dengan PPN. Literasi keuangan, di sisi lain, memainkan peran penting dalam membantu individu memahami kewajiban pajak dan manfaat yang terkait dengan pembayaran pajak, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang kontribusi mereka terhadap tugas-tugas pemerintah. Dengan demikian, konsep Teori Kepentingan dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana variabel Kesadaran Wajib Pajak, *Fintech*, Dan Literasi Keuangan Memengaruhi Perilaku Terkait Pajak Pertambahan Nilai

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan konsep yang mencakup pemahaman dan ketaatan wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah, serta pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks perpajakan (Nurhayati, 2023). Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman akan jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, tarif pajak yang berlaku, dan batas waktu pembayaran pajak. Lebih dari sekadar pemahaman, kesadaran wajib pajak mencerminkan juga ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk melaporkan pendapatan dengan akurat, mengikuti prosedur perpajakan, dan membayar jumlah pajak yang seharusnya (Marasabessy, 2020).

Pemerintah sering memberikan pendidikan perpajakan kepada masyarakat melalui kampanye informasi dan program pendidikan pajak guna meningkatkan kesadaran ini. Penting untuk diingat bahwa kesadaran wajib pajak yang kuat dapat berdampak positif pada perekonomian, dengan pendapatan pajak yang stabil mendukung berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan publik lainnya, yang pada gilirannya bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Financial Technology

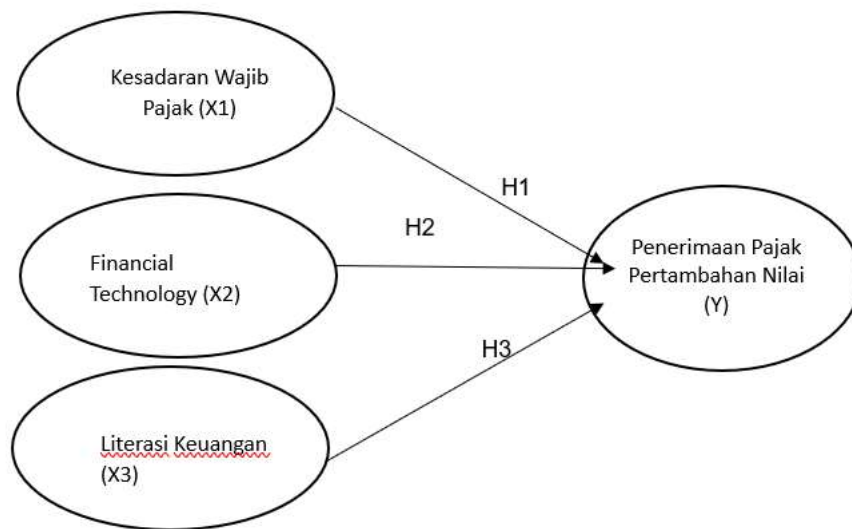
Perusahaan *Fintech* menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan mereka. Produk *Fintech* biasanya berupa sistem yang dirancang untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan tertentu (Disemadi, 2022). Seiring dengan perkembangan perusahaan rintisan atau startup, fintech sendiri semakin populer. Menurut (Kristiani, 2020), *Fintech* adalah bagian dari industri keuangan yang menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi. Jika tidak diatur dengan baik, inovasi ini dapat mengganggu industri perbankan.

Literasi Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka saat membuat keputusan tentang pengelolaan keuangan pribadinya untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, tujuan meningkatkan literasi keuangan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang tentang pengelolaan keuangan pribadinya. Menurut (Arianti, 2019), literasi keuangan terkait dengan manajemen keuangan, artinya seseorang dapat menghindari masalah keuangan jika mereka lebih memahami keuangan mereka. Proses mendapatkan uang, mengelola uang, menyimpan uang, dan menggunakan uang adalah

beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan kecerdasan keuangan seseorang (Al Islami, 2023).

Model Penelitian



Hipotesis

H1 : Terdapat hubungan positif antara tingkat kesadaran wajib pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

H2 : Terdapat hubungan positif antara *Financial Technology* dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

H3: Terdapat hubungan positif antara Literasi Keuangan dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, financial technology (fintech), dan literasi keuangan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur secara objektif hubungan antara variabel-variabel tersebut, yang difokuskan pada bagaimana kesadaran dan literasi keuangan wajib pajak serta pemanfaatan teknologi finansial dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak. Penelitian ini memberikan pemahaman yang terukur tentang efektivitas strategi perpajakan di KPP Pratama Gianyar dan relevansinya dalam konteks pengelolaan pajak berbasis digital.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data “merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian”. (Wiratna, 2014:74). Teknik pengumpulan data sangat penting dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga masalah yang timbul dapat dipecahkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: angket atau kuesioner. Penyebaran angket dilakukan setelah persiapan yang cermat, termasuk uji coba terhadap sejumlah responden uji coba. Setelah pengisian oleh responden, data dari angket akan dikumpulkan dan diolah untuk analisis lebih lanjut. Teknik pengumpulan data ini

diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan dengan tujuan penelitian dan membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.

Prosedur Pengumpulan Data

a) Membuat kuesioner

Kuesioner dalam penelitian ini dibuat sesuai dengan kajian teori yang telah dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu. Terdapat total 40 pertanyaan dalam kuesioner yang terdiri dari masing-masing 10 pertanyaan pada variabel Y, X1, X2, X3

b) Menentukan jumlah responden

Jumlah populasi Wajib Pajak (WP) aktif di KPP Pratama Gianyar sebanyak 119.156 orang. Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini ialah “*Purposive Sampling*” dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai responden. Setelah menghitung berdasarkan rumus Slovin, diperoleh jumlah responden penelitian ini yaitu 100 responden.

c) Menyebarakan kuesioner

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner secara *online* dan *offline* melalui link gform <https://forms.gle/uK5ipYPZws3qLBx96>.

HASIL PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui determinasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Gianyar. Total kuesioner yang disebar yaitu 100 kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Karakteristik	Pilihan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	30	30,0
		Perempuan	70	70,0
		Jumlah	100	100
2	Umur	21-30 Tahun	55	55,0
		31-40 tahun	33	33,0
		> 40 Tahun	12	12,0
		Jumlah	100	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 100 orang, responden laki-laki sebanyak 30 orang (27%) dan jumlah perempuan sebanyak 70 orang (73%). Rentang umur dengan nilai tertinggi adalah umur 21-30 tahun sebanyak 55 orang (55%) dan rentang umur terendah adalah umur > 40 tahun sebanyak 12 orang (12%).

Uji Instrumen Penelitian

Sebelum kuesioner disebar, diperlukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas alat ukur (Sugiyono, 2014). Setelah itu, data yang diperoleh dari kuesioner akan diuji distribusinya untuk menentukan apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji instrument penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Y1.1	0,692	0,1966	Valid
		Y1.2	0,683	0,1966	Valid
		Y1.3	0,729	0,1966	Valid
		Y1.4	0,667	0,1966	Valid



		Y1.5	0,586	0,1966	Valid
		Y1.6	0,629	0,1966	Valid
		Y1.7	0,650	0,1966	Valid
		Y1.8	0,658	0,1966	Valid
		Y1.9	0,561	0,1966	Valid
		Y1.10	0,630	0,1966	Valid
2	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,695	0,1966	Valid
		X1.2	0,688	0,1966	Valid
		X1.3	0,738	0,1966	Valid
		X1.4	0,790	0,1966	Valid
		X1.5	0,769	0,1966	Valid
		X1.6	0,599	0,1966	Valid
		X1.7	0,705	0,1966	Valid
		X1.8	0,676	0,1966	Valid
		X1.9	0,663	0,1966	Valid
		X1.10	0,704	0,1966	Valid
3	<i>Financial Technology (X2)</i>	X2.1	0,703	0,1966	Valid
		X2.2	0,668	0,1966	Valid
		X2.3	0,722	0,1966	Valid
		X2.4	0,625	0,1966	Valid
		X2.5	0,646	0,1966	Valid
		X2.6	0,659	0,1966	Valid
		X2.7	0,619	0,1966	Valid
		X2.8	0,542	0,1966	Valid
		X2.9	0,666	0,1966	Valid
		X2.10	0,605	0,1966	Valid
4	Literasi Keuangan (X3)	X3.1	0,799	0,1966	Valid
		X3.2	0,636	0,1966	Valid
		X3.3	0,565	0,1966	Valid
		X3.4	0,743	0,1966	Valid
		X3.5	0,680	0,1966	Valid
		X3.6	0,766	0,1966	Valid
		X3.7	0,706	0,1966	Valid
		X3.8	0,611	0,1966	Valid
		X3.9	0,699	0,1966	Valid
		X3.10	0,650	0,1966	Valid

Tabel uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,1966). Maka dari itu seluruh variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Jumlah Item	Keterangan
1	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	0,845	10	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,884	10	Reliabel
3	<i>Financial Technology (X2)</i>	0,843	10	Reliabel
4	Literasi Keuangan (X3)	0,870	10	Reliabel

Tabel uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,60. Maka dari itu seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mini mum	Maksi mum	Rata- rata	Std. Deviation
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	100	1,00	4,00	3,445	0,866
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	100	1,00	4,00	3,486	0,866
<i>Financial Technology</i> (X2)	100	1,00	4,00	3,385	0,866
Literasi Keuangan (X3)	100	1,00	4,00	3,499	0,866
Valid N	100				

Berdasarkan Tabel dapat dijelaskan bahwa hasil analisis statistik deskriptif variabel penerimaan pajak pertambahan nilai dengan data sebanyak 100 responden dengan nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 4,00 serta rata-rata 3,445 dan standar deviasi 0,866. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang rendah dan data tersebar secara merata.

Variabel penerimaan kesadaran wajib pajak dengan data sebanyak 100 responden dengan nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 4,00 serta rata-rata 3,486 dan standar deviasi 0,866. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang rendah dan data tersebar secara merata.

Variabel *financial technology* dengan data sebanyak 100 responden dengan nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 4,00 serta rata-rata 3,385 dan standar deviasi 0,866. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang rendah dan data tersebar secara merata.

Variabel literasi keuangan dengan data sebanyak 100 responden dengan nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 4,00 serta rata-rata 3,499 dan standar deviasi 0,866. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang rendah dan data tersebar secara merata.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.379	2.140		1.579	.118
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.250	.114	.253	2.194	.031
	<i>Financial Technology</i> (X2)	.241	.094	.252	2.581	.011



Literasi Keuangan (X3)	.406	.107	.391	3.782	.000
---------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Berdasarkan Tabel dapat dijelaskan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, *financial technology*, dan literasi keuangan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, secara sistematis terlihat persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 3,379 + 0,253 X_1 + 0,252 X_2 + 0,391 X_3$$

Berdasarkan model persamaan regresi liner berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 3,379 dengan arah positif, mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai dengan asumsi tidak terjadi perubahan pada variabel kesadaran wajib pajak, *financial technology*, dan literasi keuangan.
- 2) Nilai koefisien (b_1) menunjukkan arah positif sebesar 0,253 berarti peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai meningkat, apabila kesadaran wajib pajak meningkat dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 3) Nilai koefisien (b_2) menunjukkan arah positif sebesar 0,252 berarti peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai meningkat, apabila *financial technology* meningkat dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 4) Nilai koefisien (b_3) menunjukkan arah positif sebesar 0,391 berarti peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai meningkat, apabila literasi keuangan meningkat dengan asumsi variabel lainnya tetap.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,031 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung positif sebesar 2,194 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Gianyar.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Putri & Wijaya, 2022) yang menyatakan bahwa salah satu kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian lain (Ischabita et al., 2022) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci bagi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak. Partisipasi masyarakat yang memahami pentingnya membayar pajak berperan dalam mendukung pembangunan negara. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, tidak hanya diperlukan kontribusi dari Direktorat Jenderal Pajak atau petugas pajak, tetapi juga keterlibatan aktif dari para wajib pajak.

Pada penelitian ini, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Gianyar. Pertama, pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pajak menjadi faktor kunci, karena kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak untuk mendukung pembangunan nasional dapat memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu turut berperan

penting; semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar pula kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang berlaku, yang secara langsung meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain, kesadaran akan tanggung jawab sosial membuat wajib pajak memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sehingga mereka terdorong untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab. Faktor lain yang berpengaruh adalah persepsi wajib pajak tentang keadilan sistem perpajakan, karena sistem yang dipandang adil cenderung meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh dan berkontribusi. Transparansi dan kepastian hukum juga menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak; sistem yang transparan dan kepastian aturan yang konsisten memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai perpajakan memiliki dampak positif, karena pegawai yang kompeten dapat memberikan sosialisasi dan edukasi yang efektif, membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih jelas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kesadaran wajib pajak yang tinggi di KPP Pratama Gianyar berpotensi besar meningkatkan kepatuhan dan pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan PPN (Nur, 2018; Hidayati & Muniroh, 2023; Susanto & Fiorita, 2023).

Pengaruh *Financial Technology* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel *financial technology* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung positif sebesar 2,581 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif antara *financial technology* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa *financial technology* dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Gianyar.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Haptari & Aribowo, 2019), yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan besarnya pola transaksi keuangan P2P lending berdampak pada penerimaan pajak, komposisi sektor perpajakan, dan pertumbuhan sektor pajak. Hasil penelitian ini juga positif karena menunjukkan adanya korelasi antara perkembangan *Fintech* P2P lending dengan penerimaan perpajakan di Indonesia.

Pengaruh *financial technology* (fintech) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Gianyar dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama, dari sisi efisiensi operasional, penggunaan *fintech* dapat mempercepat proses administrasi perpajakan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Sistem berbasis digital mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memproses transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar PPN. Kedua, tingkat kepuasan pengguna juga meningkat seiring dengan kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech*. Pengguna dapat mengakses layanan pajak secara online kapan saja, sehingga meningkatkan kenyamanan dan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dari segi keamanan dan perlindungan data, *fintech* menawarkan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi informasi pribadi dan data transaksi wajib pajak, yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pengguna. Perlindungan data ini mengurangi risiko kebocoran data atau akses ilegal yang dapat merugikan wajib pajak, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan mereka dalam menggunakan layanan berbasis teknologi untuk membayar pajak. Kepatuhan regulasi juga menjadi faktor yang berperan penting, karena *fintech* yang diadopsi harus

mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini menjamin bahwa *platform fintech* yang digunakan sesuai dengan ketentuan pajak, yang pada akhirnya mendukung peningkatan penerimaan PPN secara legal dan terstandar. Selain itu, kemitraan strategis antara KPP Pratama Gianyar dan penyedia *fintech* dapat memperluas jangkauan layanan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Kerja sama ini juga dapat menciptakan berbagai inovasi yang mendukung digitalisasi sistem perpajakan, seperti integrasi data dan pemantauan transaksi secara real-time. Dengan indikator-indikator tersebut, *fintech* memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Gianyar, baik melalui peningkatan efisiensi, keamanan, maupun kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *financial technology* dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu: efisiensi operasional, tingkat kepuasan pengguna, keamanan dan perlindungan data, kepatuhan regulasi, dan kemitraan strategis. Artinya yaitu seluruh indikator tersebut berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Gianyar (Haptari & Aribowo, 2019; Hambali & Setyowati, 2020; Nijjer et al., 2022).

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel literasi keuangan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung positif sebesar 3,782 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif antara literasi keuangan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Gianyar.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Al Islami, 2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan, secara parsial berpengaruh positif terhadap potensi penerimaan PPN. Ketika melihat pengaruhnya secara simultan, tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh literasi keuangan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Gianyar dapat dilihat melalui beberapa indikator yang terkait dengan tingkat pemahaman wajib pajak dalam mengelola keuangannya. Pertama, pengetahuan keuangan menjadi faktor dasar yang penting karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep keuangan, seperti pajak dan kewajiban pajak, cenderung lebih patuh dalam membayar PPN. Pengetahuan ini membantu mereka memahami peran dan manfaat pajak serta pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Kedua, keterampilan mengelola keuangan juga berperan dalam peningkatan penerimaan PPN. Wajib pajak yang memiliki keterampilan untuk mengatur anggaran dan mengelola arus kas dengan baik akan lebih siap untuk menyisihkan dana yang cukup untuk membayar kewajiban pajak mereka. Ketika wajib pajak mampu mengelola keuangan secara efektif, mereka akan cenderung memenuhi kewajiban PPN mereka dengan lebih tertib. Selanjutnya, sikap terhadap keuangan juga memengaruhi penerimaan pajak. Sikap positif terhadap pajak dan pengelolaan keuangan mencakup kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap kewajiban keuangan mereka akan lebih terdorong untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perilaku keuangan yang baik, seperti konsistensi dalam melakukan pembayaran tagihan atau kewajiban lainnya tepat waktu, mencerminkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban keuangan mereka, termasuk kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang terbiasa memenuhi kewajiban

keuangan secara tepat waktu lebih cenderung membayar PPN tepat waktu, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas penerimaan pajak. Terakhir, kemampuan mengambil keputusan keuangan memainkan peran penting dalam memengaruhi penerimaan pajak. Wajib pajak yang mampu membuat keputusan keuangan yang bijak dan mempertimbangkan kewajiban pajak dalam perencanaan keuangan mereka akan lebih mampu menyisihkan dana untuk pembayaran pajak. Dengan pengelolaan yang baik, mereka dapat menjalankan kewajiban pajaknya secara rutin dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, tingkat literasi keuangan yang baik di antara wajib pajak di KPP Pratama Gianyar berpotensi meningkatkan penerimaan PPN karena literasi keuangan mendorong pemahaman, sikap positif, serta perilaku keuangan yang mendukung kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pada penelitian ini, literasi keuangan dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu: pengetahuan keuangan, keterampilan mengelola keuangan, sikap terhadap keuangan, perilaku keuangan, dan kemampuan mengambil keputusan keuangan. Artinya yaitu seluruh indikator tersebut berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Gianyar (Al Islami, 2023; Sutisyo & Hidayat, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak
2. *financial technology* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa *financial technology* dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Gianyar.
3. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Gianyar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang telah diuraikan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih mendeskripsikan demografi dari responden dengan cara mencantumkan domisili wajib pajak pribadi pada kuesioner.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian menggunakan responden dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang sudah ber-PPK (Pengusaha Kena Pajak).
3. Pada variabel *financial technology* lebih dikerucutkan pada system *e-wallet* atau *m-banking* maupun *crypto currency* yang memungkinkan dapat digunakan untuk membayar pajak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Islami, A. N. (2023). *PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN, LITERASI PAJAK, DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP POTENSI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)*.
- Ardianti, N. H. P., Mahaputra, K. A. I. N., & Utamidewi, G. A. A. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*



- BADAN DI KPP PRATAMA GIANYAR. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 1–10.
- Arianti, B. F. (2019). PENGARUH PENDAPATAN DAN PERILAKU KEUANGAN TERHADAP LITERASI KEUANGAN MELALUI KEPUTUSAN BERINVESTASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi*.
- Disemadi, H. S. , S. N. Z. , J. D. , H. R. , G. L. K. B. , T. J. J. , & K. M. (2022). Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 68-76.
- Haptari, V. D., & Aribowo, I. (2019). ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PADA FINTECH KHUSUSNYA PEER TO PEER (P2P) LENDING UNTUK MENYUSUN ATURAN PERPAJAKAN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 53–63.
- Herawati, Kurniawan, Sujana, Dewi, & Dewi. (2020). Pemanfaatan Financial Technology Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 179–186.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 2, 1–13.
- Kristiani, D. L. (2020). *IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA*.
- MARASABESSY, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Akuntansi*.
- Nur, M. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *PERSPEKTIF: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2). www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Nurhayati. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Unisma Bekasi*.
- Nurlaila. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya 2020). (*Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi*).
- Pirri, E. L., Pasanda, E., & Halick, M. Y. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEBISNIS ONLINE. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 104–111.
- Pratama, F. R. (2021). KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEPENTINGAN DALAM REGULASI EKONOMI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.
- Renata, & Kaniskha. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan*, 9(9).

- Silalahi, & Ginting. (2020). Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 156–167.
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *EKUIVALENSI*, 5(1), 84–97.
- Susanto, & Khoiriawati. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. . . *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 8–19.
- Widiasti, N. N., Datrini, L. K., & Miati, N. L. P. M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7615.13-19>